

PERAN UNITED NATIONS WOMEN (UN WOMEN) DALAM MENCIPTAKAN KESETARAN GENDER DI AFGHANISTAN

Oleh: Anisa Trianjani

(Email: anisa.trianjani4340@student.unri.ac.id)

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Bibliografi: 6 Buku, 15 Jurnal, 15 Website

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the role of UN Women in creating gender equality in Afghanistan. Afghan women have experienced a lot of discrimination, such as not being allowed to leave the house without the assistance of a muhrim or a brother, being restricted from getting an education, and not being allowed to work. Therefore, UN Women is present in Afghanistan to help women regain their rights by carrying out various strategic programs and activities that have been designed by UN Women.

This study uses qualitative methods, with data collection techniques using library research methods by collecting data sources from journals, books, and websites. This study uses the perspective of Pluralism and uses the theory of the role of International Organizations.

Based on these data, this study succeeded in finding that the role of UN Women in Afghanistan has a role as an Instrument, Arena and Independent Actor. These roles have made a difference in creating gender equality for Afghan women, although there are still problems left behind.

Keywords: UN Women, Gender Equality, Afghanistan.

1. Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang peran dari *United Nations Women* (UN Women) yang merupakan organisasi berfokus pada permasalahan perempuan global. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana UN Women menangani permasalahan pada perempuan di Afghanistan serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh UN Women untuk membantu para perempuan di Afghanistan.

Negara Afghanistan dikenal sebagai negara yang porak-poranda dengan negara yang dilanda perang, baik perang yang disebabkan oleh masa dari kerajaan sebelumnya pada masa sebelum masehi (SM). Afghanistan adalah negara yang sangat berbahaya bagi kaum perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan nya sangat berkepanjangan.¹

Afghanistan merupakan negara islam dengan mayoritas penduduknya menganut agama islam. Sekitar 80 persen penganut islam merupakan aliran Sunni, sementara 19 persen adalah pengikut aliran Syi'ah. Secara tradisional pakaian yang dikenakan oleh masyarakat Afghanistan adalah menggunakan desain-desain dan juga kombinasi warna yang indah, namun secara syariah islam juga menetapkan norma-norma yang ketat tentang cara berpakaian masyarakat Afghanistan. Para pria biasanya menggunakan Salwar-kameez, sedangkan kaum perempuan diharapkan menggunakan setelan Burqa.

Masyarakat Afghanistan memandang bahwa kaum perempuan sebagai penjaga budaya dan juga 'kehormatan';keluarga.Pada akhirnya kaum perempuan dianggap tidak menghormati keluarga dan para masyarakat ketika mereka terkena pelecehan seksual. Untuk mencegah terjadinya pelecehan, penghinaan dan juga kekerasan para masyarakat Afghanistan beranggapan bahwa kaum perempuan yang sudah terkena imbasnya harus bungkam dan diam dibawah banyak nya tekanan.²

Kekuasaan kelompok Taliban runtuh tepatnya pada bulan Desember 2001 lalu, usai koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat(AS) yang meluncurkan serangan langsung ke Afghanistan. Serangan itu bermula dari tuduhan dari Amerika Serikat(AS) terhadap kelompok Taliban yang dimana Taliban melindungi Osama Bin Laden dan gerakan Al-qd bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di World Trade Centre (WTC), New York pada bulan September 2001 silam.

Kehidupan para perempuan di Afghanistan ditahun 2021 pun mulai terancam kembali seperti yang sudah pernah terjadi pada tahun 1996 silam, yang dimana perempuan ditarik hak-hak kehidupannya oleh para kelompok Taliban. Banyak larangan dan peraturan yang dibuat oleh kelompok Taliban untuk para perempuan Afghanistan seperti dilarang untuk menonton televisi, memakai cat kuku, tidak boleh bertemu lawan jenis yang bukan mahramnya jika diatas 12 tahun, mendengarkan music, pergi ke

¹ Ahmad Khan, *Women and Gender in Afghanistan* (Virginia: The Civil-Military Fusion Centre, 2012)

² Islamic Republic of Afghanistan. 2004. *The constitution of Afghanistan*

salon, memakai pakaian fashion modern dan juga menggunakan perhiasan.³

Perempuan—tidak diperbolehkan bekerja, anak perempuan tidak boleh menempuh pendidikan, dipaksa menikah, perempuan juga diwajibkan menggunakan burqa agar menutupi wajah mereka, tidak boleh pergi sendirian dan tidak boleh menyetir mobil. Jika perempuan tersebut melanggar peraturan yang telah dibuat maka perempuan itu akan mendapatkan hukuman berupa cambuk dari Polisi Syariah setempat.⁴

Ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa sampai saat ini kaum perempuan masih banyak diperlakukan secara kurang dihargai. Berbagai macam bentuk kekerasan serta pelecehan membuktikan bahwa perjanjian atau konvensi yang telah diikrarkan masih belum ditepati dan belum dijalankan secara efektif jika negara dan organisasi internasional nya tidak berjalan secara berdampingan sebagai aktor hubungan internasional di masa globalisasi pada masa sekarang ini, jika aktor tersebut dapat jalan secara berdampingan maka akan terciptalah kesetaraan terhadap perempuan dan kesetaraanya terhadap laki-laki.

Disamping keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan dan juga pekerjaan, kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perempuan Afghanistan. Ada 87% dari mereka yang sudah mengalami dan mendapat kekerasan berupa fisik, seksual dan juga psikologis selama hidup

mereka.⁹ Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan Afghanistan meningkat dari tahun ke tahun nya, beberapa kekerasan yang terjadi diantaranya adalah kekerasan fisik dan seksual sebanyak 1.263 orang, kawin paksa 769 orang, pembunuhan sebanyak 375 orang, penyiksaan sebanyak 231 orang, penculikan sebanyak 102 orang dan perdagangan perempuan sebanyak 6 orang.⁵

Maka dari itu UN Women, organisasi yang bekerja secara resmi di Afghanistan pada bulan juli tahun 2010 lalu membangun visi misi yang tujuan utamanya adalah membangun kesetaraan gender, terutama untuk hak-hak wanita yang masih ditemukan banyak ketidakadilan. Sebagai organisasi yang berada di bawah kepemimpinan PBB, organisasi UN Women yang bergerak khusus di bidang pemberdayaan wanita. Organisasi ini sangat berperan untuk membantu dan meringankan penderitaan bagi para wanita yang mendapatkan tindakan diskriminasi di sekitarnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan sebuah pertanyaan penelitian dari rumusan masalah diatas, yaitu **Bagaimana Peran dari United Nations Women (UN Women) dalam Menciptakan Kesetaraan Gender di Afghanistan pada tahun 2014-2016?**

³ Pena persada 2001, tahun 2001, dalam Hiqma Nur Agustina “Perempuan Afghanistan Represi dan Resistensi” (Purwokerto: pena persada, 2021) hlm 3, melalui <https://osf.io/7a8zc/> pada 20 October 2021 pukul 20:38 PM.

⁴ Kumpran Woman. “Nasib Perempuan Afghanistan saat Taliban Berkuasa, Terancam Mengalami Kemunduran”. 18 Agustus 2021.

(diakses melalui <https://kumparan.com/kumparanwoman/nasib-perempuan-afghanistan-saat-taliban-berkuasa-terancam-mengalami-kemunduran-1wM9ipMjRb5/4>, pada 20 Oktober 2021. Jam 20.57 WIB)

⁵ Australian Government, Elimination of Violence Against Women in Afghanistan (Australia: Departmen of Foreign Affairs and Trade, 2015) 7

2. Kerangka Teori

Prespektif: Pluralisme

Pendekatan yang digunakan dalam studi Hubungan Internasional yang tujuannya untuk melihat cara pandang memahami isu kalangan internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Pluralisme. Di dalam perspektif ini, isu-isu Hubungan Internasional memiliki dimensi yang sangat luas dan juga beragam, kaum penganut Pluralisme memiliki sudut pandang sistem internasional tidak hanya semata-mata ditentukan oleh aktor negara (State actor) tetapi juga aktor non-negara (non-state actor).

Kaum penganut pluralisme juga melihat adanya isu Hubungan Internasional dalam konteks yang lebih luas dan juga cenderung memfokuskan pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat.⁶ Pluralisme ini juga sangat memfokuskan pada masalah kasus sosial, ekonomi dan juga masalah lingkungan yang tidak hanya fokus kepada keamanan nasional saja.⁷

2.1 Teori: Peran Organisasi Internasional

Dalam menganalisis penelitian, penulis menggunakan teori Peran Organisasi Internasional. Teori peran menjelaskan bahwa setiap perilaku politik adalah sikap dalam melakukan peran dalam berpolitik. Organisasi Internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional untuk membantu suatu kelambagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait di dalam berbagai bidang. Kehadiran Organisasi

Internasional sebagai aktor internasional ini sangat diharapkan untuk turut berperan aktif dalam permasalahan yang ada di dunia.

Organisasi Internasional hadir untuk mencerminkan setiap kebutuhan manusia agar dapat bekerja sama sekaligus untuk dapat mengetahui masalah-masalah apa yang sering terjadi. Menurut Clive Archer peran Organisasi Internasional dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Sebagai suatu instrumen. 1. Organisasi internasional digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui tujuan politik suatu negara yang dilakukan oleh beberapa negara anggota.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional terhadap negaranya dan menjadi tempat untuk membicarakan atau membahas masalah yang telah terjadi.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan mereka sendiri tetapi tidak ada paksaan sama sekali dari pihak luar organisasi.⁸

Sedangkan teori peran organisasi internasional menurut T. May Rudi adalah Organisasi Internasional tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi antara negara lainnya, dengan didasari oleh struktur organisasi yang jelas dan juga lengkap serta diproyeksikan untuk keberlangsungan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlakukan serta disepakati bersama,

⁶ Laode Muh. Fathun. review buku "Human Rights in International Relations". 2017. Halaman 169

⁷ Nadine Qamara S, Skripsi: "Peran WHO Dalam mengatasi Tuberculosis di Afrika Selatan" (Bandung: UKP, 2017)

⁸ Teuku May, Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung, 2005)

baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-analitik. Dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁹ Metode ini dilakukan dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor internasional dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi.

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam memperoleh data sekunder untuk penelitian ini adalah melalui **studi pustaka** atau **library research**, teknik yang di gunakan temuan-temuan untuk menunjang penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu dengan cara membaca, mencatat dan juga mengolah bahan-bahan yang ingin di teliti.¹⁰ Penulis menggunakan dan memperoleh data serta bahan-bahan melalui buku, journal, artikel, berita maupun publikasi online seperti artikel mengenai permasalahan yang dibahas pada tema ini.

3. Hasil Penelitian

Selama bertahun-tahun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menghadapi banyak tantangan serius dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan permasalahan secara global, hal ini salah satunya dikarenakan tidak adanya agensi dari PBB yang secara khusus bergerak pada isu-isu kesetaraan gender dan juga

pemberdayaan terhadap perempuan. PBB sebenarnya telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui perjanjian-perjanjian penting sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.¹¹

Hampir seluruh perempuan di bagian dunia masih ada beberapa yang menderita kekerasan dan serta ketidaksetaraan serta tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu pada bulan Juli di tahun 2010 majelis umum PBB menciptakan organisasi UN Women sebagai agensi PBB yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.¹²

UN Women adalah organisasi yang bergerak dibawah PBB yang didirikan untuk kegiatan gender dan juga pemberdayaan perempuan. Pendirian dari UN Women sendiri merupakan bagian dari agenda reformasi PBB dengan cara menyatukan sumber daya yang mandat untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan perempuan di dunia.¹³

Dalam kesetaraan gender ini telah dijadikan standar dari hukum hak asasi manusia internasional oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diambil pada 10 Desember tahun 1948 lalu oleh Majelis Umum PB. Dalam hal ini, tanpa membedakan warna kulit, bahasa, ras, agama, bahasa, jenis kelamin, kelahiran dan juga status lainnya.¹⁴ UN Women sendiri lahir tidak hanya untuk pengakuan terhadap HAM saja melainkan juga kewajiban dalam aspek sosial dan juga ekonomi agar

⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung P.T Remaja Rosda Karya, 2004). Halaman 2.

¹⁰ Mestika Zed, Metode penelitian kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2-3.

¹¹ United Nations Assistance Mission in Afghanistan Kabul (UNAMA) dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "A Long Way to Go: Implementation of the

Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan", (Kabul, November 2011),

¹² United Nations, "UN Creates New Structure for Empowerment of Women", (New York: United Nations, 2 July 2010).

¹³ Ibid

¹⁴ United Nations "Gender Equality" diakses di <https://www.un.org/en/globalissues/genderequality>, pada tanggal 8 April 2022 pukul 10.59 WIB.

nantinya tercipta masyarakat yang produktif dan juga stabil.¹⁵

Tujuan dibentuknya UN Women ini adalah untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama perempuan di dunia, semua isu pembangunan manusia dan juga hak-hak asasi manusia memiliki dimensi gender tersendiri. Organisasi UN Women ini sendiri berfokus pada bidang-bidang prioritas fundamental untuk kesetaraan perempuan dan juga untuk dapat membantu membuka kunci kemajuan di seluruh bidang, antara lain adalah¹⁶ :

1. Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan;
2. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan;
3. Melibatkan perempuan dalam semua aspek proses perdamaian dan keamanan;
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan.

5. Menjadikan kesetaraan gender sebagai pusat perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional.

UN Women sendiri juga mengordinasikan dan mempromosikan sistem kerja PBB dalam kesetaraan gender dan juga dalam setiap pertimbangan dan juga perjanjiannya terkait agenda di tahun 2030. Entitas tersebut bekerja untuk memposisikan kesetaraan gender sebagai hal yang sangat mendasar dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta dunia yang lebih inklusif. Tujuan dari UN Women sendiri didirikan juga untuk meningkatkan dan bukan untuk menggantikan kinerja dari sistem PBB yang telah dibuat sebelumnya seperti UNICEF, UNDP dan UNFPA.

UN Women telah bekerja sama dengan beberapa elemen yang penting di Afghanistan sejak tahun 2002 seperti lembaga pemerintahan yang terdiri dari kementerian dan juga lembaga independen serta juga NGO yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Terdapat juga lima belas (15) lembaga pemerintahan yang bekerjasama dengan UN Women dan juga mempromosikan hak asasi perempuan, yaitu: 1. Kementerian Urusan Perempuan, 2. Kementerian Keuangan, 3. Kementerian Luar Negeri, 4. Kementerian Hukum, 5. Kementerian Dalam Negeri, 6. Kementerian Kesehatan Masyarakat, 7. Kementerian Informasi dan Budaya, 8. Kementerian Agama dan Haji, 9. Kementerian Pembangunan dan Rehabilitasi Desa, 10. Attorney General's Office, 11. Afghan Women Judges Association, 12. CEVAW, 13. Parliamen and Women's Commissions, 14. Afghan Independent Human Rights Commission, 15. High Peace Council.¹⁷

Kerjasama ini sangat mempermudah kinerja dari organisasi UN Women sendiri untuk mencapai tujuan utama mereka yaitu untuk mencapai tujuan dari UN Women agar dapat mempromosikan hak asasi perempuan di Afghanistan. Selain bekerjasama dengan lembaga pemerintah, UN Women juga bekerja sama dengan beberapa NGO yang berada di Afghanistan.

Beberapa NGO yang berada di Afghanistan adalah Afghan Women for Afghan Women dan Humanitarian Assistance for Women and Children of Afghanistan.¹⁸ Kedua NGO tersebut adalah NGO yang bekerjasama dengan UN Women didalam menjamin perlindungan hak asasi perempuan sehingga upaya yang dilakukan oleh UN Women bisa langsung menyentuh ke akar rumput.

¹⁵ Ibid

¹⁶ "About UN Women", diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, diakses 16 Maret 2022 12.12 WIB.

¹⁷UN Women, "Partnership", <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/partners>, diakses pada 17 Maret 2022 pukul 12.53 WIB.

¹⁸ Ibid

Afghanistan adalah negara yang terletak di bagian selatan dari Benua Asia, letak Afghanistan sendiri sangatlah strategis karena dikelilingi oleh negara-negara dari Timur tengah, Asia Tengah dan Asia Timur. Negara Afghanistan telah membuat sejarah konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, kondisi konflik yang terjadi di Afghanistan telah memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap pertumbuhan negara di Afghanistan.¹⁹

Berbicara tentang konflik di Afghanistan, yang dimana sudah terjadi konflik selama lebih dari empat dekade. Sebagian besar penduduk di Afghanistan tidak pernah mengalami masa damai. Dalam 15 tahun terakhir, komunitas internasional memiliki fokus besar terhadap pengembangan untuk membangun kembali negara Afghanistan. Dengan bantuan organisasi internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional, mempunyai upaya yang cukup besar dalam pengembangan seperti pemerataan akses pendidikan, pembangunan sekolah, pemberdayaan perempuan dan juga rekonsiliasi nasional.

4.1 Peran United Nations Women (UN Women)

Peran dari United Nations Women (UN Women) sendiri adalah untuk membantu pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan melalui dua cara, yaitu dengan cara pencegahan dan perlindungan. Bantuan tersebut berupa bantuan teknis dan juga keuangan kepada kementerian urusan perempuan dan masyarakat sipil di Afghanistan.²⁰

Paksanaan peran dan juga fungsi nya sebagai organisasi internasional yang bergerak dibawah PBB, UN Women sendiri tidak terlibat langsung dalam pemerintahan dan juga pengawasan dalam pelaksanaan agenda kesetaraan gender negara anggota, namun mereka membuat standart internasional nya sendiri untuk pemenuhan kesetaraan gender melalui perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi pedoman utama dalam mencapai dan membuat program keputusan di negara anggota.²¹

Pada tahun 2010 *United Nations Women* (UN Women) memiliki tiga program bantuan yang diciptakan yaitu 1. *Strengthening Government's Capacity to Implement National Action Plan for the Women of Afghanistan* (NAPWA) dan *Afghanistan National Development Strategy (ANDS) Gender Cross-Cutting Strategy: Translating Commitments to Actions*, 2. *Eliminations of Violence Against Women: Gender and Justice*, 3. *Eliminations of Violence against Women: Special Funds*. Program ini bertujuan untuk memberikan akuntabilitas kepada perempuan dan kesetaraan gender di Afghanistan, memajukan Hak Asasi perempuan melalui pelaksanaan resolusi dewan keamanan PBB 1325, resolusi dewan keamanan PBB 1820 dan CEDAW, partisipasi perempuan Afghanistan dalam pembangunan perdamaian dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.²²

UN Women juga pernah berperan untuk membantu para perempuan imigran dalam kasus perdagangan perempuan, UN Women membantu melindungi perempuan dalam tindakan kriminal seperti

¹⁹Insight on conflict, Aghanistan: Conflict profile, terdapat pada <http://www.insightonconflict.org/conflicts/afghanistan/conflict-profile/> , diakses pada 23 February 2022 pukul 17.23 WIB.

²⁰ UN Women, "Programmes", <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/programmes> Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 16.31 WIB

²¹ <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publication/2016/12/cedaw-for-youth> diakses pada 21 Juni 2022.

²² Alan J. Taylor and Hangama Anwari, "Assistance to the UN Women Afghanistan Country Programme in the Planned period 2010-2013"

perdagangan perempuan dan juga eksploitasi secara kejam. Secara hukum, UN Women tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan terkait hukum serta pelaksanaan di negara berdaulat, namun upaya pencapaian perlindungan hak terhadap perempuan dilakukan dengan cara bekerja sama, terutama dalam proses pembuatan kebijakan mengenai perdagangan perempuan dan diskriminasi perempuan.

Upaya yang dilakukan oleh UN Women dalam membantu para perempuan yang terkena eksploitasi dan perdagangan perempuan tertera di dalam agenda seperti seperti Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), *Beijing Platform for Action*, dan agenda MDGs.²³ Para imigran termasuk dalam kelompok minoritas yang rentan akan kekerasan dan juga eksploitasi, dalam mengupayakan nilai-nilai dari dalam bentuk diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam stigma yang membatasi pilihan serta peran perempuan dalam aspek sosial, terkait pendidikan, karir, politik, ekonomi dan juga kesehatan.

Peran yang diberikan oleh UN Women dalam menangani masalah eksploitasi dan perdagangan perempuan yang terjadi di Yunani adalah melawan perdagangan manusia terutama perempuan, mereka melakukan dalam bentuk *legal drafting* yaitu dengan cara pembuatan dasar hukum, *capacity building* yaitu dengan cara melatih kemampuan untuk petugas pelaksanaan hukum dan juga mengadakan kerjasama dengan NGO internasional dan domestik. Di Yunani sendiri semua perencanaan, pengawasan dan juga pelaksanaan kebijakan atas kesetaraan gender berada di bawah tanggung jawab

Sekretariat Umum Kebijakan Keluarga dan Kesetaraan.

4.2 Peran UN Women di Afghanistan dalam teori peran organisasi internasional

Kehadiran dari UN Women sendiri di Afghanistan guna untuk meningkatkan kinerja perempuan, sebagai salah satu organisasi internasional perempuan yang menjadi upaya dari PBB.²⁴ Dalam membantu pemerintah Afghanistan dalam menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. UN Women juga membantu Kelompok Kerja Reformasi Hukum Pidana dan Kementerian lainnya tentang penerapan peraturan anti pelecehan terhadap perempuan.²⁵ Dalam membantu analisis penulis, penulis menggunakan teori peran organisasi internasional dari Clive Archer sebagai berikut:

4.2.1 UN Women Sebagai Instrument

Upaya yang dijanjikan oleh UN Women dalam tugasnya untuk menyetarakan kesetaraan gender di Afghanistan, UN Women melakukan perannya dalam program kerjasama yaitu dengan membantu mengurangi tingkat kemiskinan terutama pada perempuan Afghanistan, dalam menangani tingkat kemiskinan terhadap perempuan UN Women menjalankan kerja sama dengan Pelayanan Rehabilitasi Pengembangan Pedesaan dengan cara mengembangkan kapasitas mereka untuk menilai, menganalisis dan juga mengutamakan proses perencanaan perspektif gender yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sendiri, terutama dalam bidang pengembangan kesempatan perempuan di dalam bidang

²³ Maria Regina Tavares da Silva, "Abolitionist Responses to a Request United Nations Women Regarding UN Women's Approach to Prostitution, the Sex Trade, and Sex Work," 2016, www.cap-international.org.

²⁴ UN Women, "UN Women Afghanistan", <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan> diakses pada 05 Juni 2022 pukul 17.33 WIB

²⁵ UN Women, "Countries Afghanistan Programmes", <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/programmes>

ekonomi dan juga di bidang pengembangan usaha.

UN Women juga membantu MoWA (*Ministry of Women Affairs*) di dalam pembentukan Hak dan Keamanan Ekonomi Perempuan yang termasuk hak ekonomi perempuan, yang dimana hal ini juga didukung dengan melakukan konsultasi dan juga pertemuan antar kelompok kerja. UN Women sendiri mendukung Departemen Pengurusan Perempuan di dalam 3 Provinsi, yang dimana fokus untuk menawarkan kesempatan membangun aset ekonomi yang berkelanjutan bagi perempuan yang telah diabaikan oleh pengembangan keterampilan dalam bahasa dan di dalam pemakaian media komunikasi.

Pada saat ini UN Women sedang didalam fase awal tahap pengembangan pasar aman bagi kaum perempuan dalam upaya yang mendukung pengusaha perempuan untuk bergabung dalam bidang ekonomi, selain itu UN Women sendiri juga bekerja sama dengan *Ministry of Rural Rehabilitation and Development* yang menyediakan wadah pelatihan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya program mata pencaharian.

Saat ini negara Afghanistan mempunyai ekspor yang unggul dalam menjual hasil karpet, pertanian dan juga dalam menjual permata, UN Women membantu masyarakat terutama para perempuan nya dengan mendukung para perempuan dalam pengembangan pengusaha perempuan di bidang ekonomi untuk menunjukkan kerajinan hasil tangan dan produk lainnya yang dihasilkan oleh perempuan itu sendiri di dalam *India International Trade Fair (IITF)* yang diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 14 sampai dengan 27 September pada tahun 2013 silam.

Pada bulan Mei tahun 2013 lalu, UN Women membuka sebuah kantor pusat pengajaran sebagai sarana bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi didalam bidang

ekonomi dan menggunakan teknologi-komunikasi yang berbasis bahasa inggris, yang dimana sarana pengajaran ini termasuk efektif dalam sarana yang telah dibuat tersebut. UN Women sendiri juga dianggap memberikan langkah yang penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk meraih dan mendapatkan pekerjaan dengan upah kerja yang layak diterimanya dan memperjuangkan status perempuan dalam bidang ekonomi.

UN Women juga ikut bekerja sama membantu pemerintah dalam pembuatan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Internasional untuk memperkuat peraturan terkait suatu permasalahan dan juga untuk mencegah terjadinya permasalahan serta untuk memperkuat hukum tersebut. Dalam hal ini UN Women berperan untuk sebagai untuk membantu pemerintah dalam mendirikan badan hukum nasional untuk menanggulangi permasalahan tertentu, mendorong pemerintah untuk mengikuti perjanjian internasional dan juga membantu memperbaiki hukum nasional di suatu Negara.

Ketika diminta menguraikan apa arti hukum bagi mereka, beberapa dari mereka menjawab jika seorang pria memiliki hak untuk pergi ke Universitas, maka para perempuan juga pantas mendapatkan hak tersebut. Jika seorang pria memiliki hak untuk bekerja, maka para perempuan juga layak mendapatkan hak tersebut. Laki-laki dan perempuan juga setara, untuk memberi laki-laki dan perempuan hak yang sama dalam hal pendidikan dan juga hal pekerjaan

UN Women membantu mewujudkan komitmen pemerintah terutama dalam hal kesetaraan perempuan dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dalam menyediakan konsultan internasional selama enam bulan untuk membantu Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dalam merumuskan program

prioritas mereka yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas kementerian.²⁶

Dalam hal ini pemerintah Afghanistan membantu mewujudkan komitmen dalam mengimplemmentasikan Security Council Resolution (SCR) 1325 yaitu tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan, Pemerintah Afghanistan dalam hal ini Kementerian Urusan Perempuan membuat database terhadap kekerasan perempuan yang terjadi di Afghanistan, oleh karena itu dengan kesepakatan antara Pemerintah Afghanistan, UNAMA, dan UN Women bersama-sama membantu membuat protokol terhadap standarisasi pengumpulan data tentang kekerasan terhadap perempuan, selain itu telah dibuat juga protokol dan panduan tentang penanganan korban kekerasan. UN Women sendiri juga mempunyai komitmen untuk bekerja sama dengan kelompok pemuda Afghanistan untuk membantu perkembangan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Pada akhirnya Afghanistan menjadi negara kedua di kawasan Asia Selatan yang memiliki Rencana Aksi Nasional tentang UNSCR.²⁷ Hal ini membantu pemerintah Afghanistan dalam memajukan hak perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan. UN Women juga membantu dalam tahapan penerapan Rencana Aksi Nasional ini di Afghanistan dengan mendukung aksi peluncuran dan penyebaran Rencana Aksi ini di dalam tujuh provinsi di negara Afghanistan.²⁸

4.2.2 UN Women Sebagai Arena

UN Women melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian urusan perempuan, kementerian informasi, kebudayaan, kesehatan masyarakat, agama dan juga pendidikan. UN Women telah melakukan kerja sama dengan 40 LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) dan 17 organisasi pemuda dalam rangka kampanye terhadap penyadapan tentang kekerasan terhadap perempuan.

UN Women juga melakukan pertemuan dengan cara membentuk sumber daya manusia, dalam hal ini UN Women sendiri melakukan pertemuan dengan cara memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat terutama perempuan Afghanistan untuk menangani dan menghadapi suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari. Ada banyak cara dalam meningkatkan sumber daya manusia seperti dengan memberi bantuan kepada para studi dan dengan program pertukaran pelajar.

UN Women juga melibatkan beberapa LSM di Afghanistan untuk melakukan penelitian yang bertujuan dan berguna untuk memperkuat agen perubahan untuk mendukung hak-hak perempuan Afghanistan, UN Women sendiri juga membantu Afghan Women's Network untuk mempersiapkan laporan bayangan yang diberikan oleh CEDAW yang dirilis oleh pemerintah, serta partisipasi dari CEDAW sendiri di pertemuan CEDAW 2013 lalu.²⁹ Selain itu UN Women juga memberikan pelatihan dengan teknik negosiasi dan juga penganggaran responsif gender bagi semua anggota parlemen dan konselor melalui mitra pelaksana Kesetaraan untuk Perdamaian dan juga demokrasi.³⁰

Pada bulan April di tahun 2014 lalu, UN Women mengadakan pertemuan selama 5 hari dengan mengangkat tema "*Gender In Islam*" dengan dihadiri oleh 15 perempuan Afghanistan, yang juga didukung dari *Sisters In Islam (SIS)* pertemuan atau pelatihan yang diberikan oleh UN Women ini guna untuk menganalisa ilmu hukum agama Islam yang berkaitan dengan hak perempuan dalam

²⁶ Alan j., *Op.Cit*

²⁷ UN Women, "Result at Glance", (UN Women) <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/results-at-a-glance>.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Op.Cit.*, Anwari hlm 15

³⁰ *Ibid.*, hal 16.

komunitas muslim sendiri. Pertemuan ini ditujukan untuk memperkenalkan dan membantu para peserta untuk mengerti bagaimana tradisi masyarakat muslim sendiri antara Qur'an dengan tradisi Islam yang saat ini berjalan dengan fokus pada hak perempuan. Seminar ini mengajarkan para perempuan untuk membandingkan antara hak perempuan yang diakui secara global yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an dengan kehidupan yang telah dijalani, semua berkaitan dengan hubungan antara kehidupan perempuan dan laki-laki muslim pada saat berinteraksi dalam masyarakat dan di lingkup pemerintah.

Selain itu UN Women juga telah mengadakan seminar atau pertemuan untuk mendukung gerakan dari hari Peringatan Kekerasan Perempuan di Kabul, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perempuan bahwa mereka juga memiliki hak organisasi dalam hak perundang-undangan. Organisasi yang mendukung perempuan juga mengirimkan para wakilnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauhnya pengetahuan para perempuan tentang hukum tersebut.

4.2.3 UN Women Sebagai Aktor Independen

UN Women juga melakukan perannya yaitu dengan mengadakan kampanye untuk para perempuan Afghanistan yaitu dengan cara melakukan kampanye HeForShe yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi dan membuka dialog untuk para perempuan Afghanistan, khususnya di antara laki-laki di Afghanistan sendiri. Mengenai hal yang dialami masyarakat Afghanistan sendiri terutama para perempuannya, penyebab dan dampak serta tindakan yang bisa dilakukan oleh kaum laki-laki adalah untuk mendukung kesetaraan gender.

Kampanye yang telah dibuat oleh UN Women ini berguna untuk membuka

diskusi agar dapat mengubah cara pandang dan sikap terhadap perempuan terkait peran mereka di lingkungan masyarakat, keluarga dan juga lembaga pemerintah untuk akhirnya bisa menciptakan perubahan bagi perubahan para perempuan di Afghanistan. Di tahun pertama di adakan nya kampanye HeForShe ini di Afghanistan telah menjangkau lebih dari 2.400 orang laki-laki dan perempuan dalam 10 Provinsi dan 5 lembaga pendidikan lainnya, dengan adanya lebih dari 600 laki-laki yang ikut berpartisipasi untuk mendukung kampanye ini.

Kampanye HeForShe ini telah memicu dan memvalidasi kekerasan terhadap perempuan dan juga mendorong para kaum laki-laki untuk mendukung perubahan di dalam komunitas mereka masing-masing.³¹ Dalam hal ini UN Women juga merangkul seluruh pihak di Afghanistan yaitu seperti Pemerintah melalui kementrian, lembaga non pemerintah seperti NGO atau juga LSM dan masyarakat secara umum. Dalam kegiatan ini Organisasi Internasional UN Women juga memberikan konsentrasi khusus untuk mengajak dan melibatkan para laki-laki untuk ikut menyuarakan tindakan anti kekerasan terhadap perempuan.³² Hal tersebut dianggap efektif karena pelaku kekerasan terhadap perempuan sebagian besar datangnya dari kaum laki-laki.

UN women juga membangun pusat perlindungan dan juga penampungan untuk para perempuan Afghanistan yang mengalami kekerasan, tempat ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal para perempuan yang mengalami korban kekerasan sampai dengan masalah yang dihadapi nya selesai. Tempat ini juga dibangun guna untuk menyediakan bantuan medis dan psikososial, bantuan hukum serta bantuan pelayanan agar perempuan bisa kembali ke dalam masyarakat.³³

³¹ UN Women, "Result at a Glance", <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/results>

at-a-glance diakses pada 27 Juni 2022.

³² *Ibid*

³³ *Op.Cit*, Anwari, Hal 19.

Dalam melakukan peran ini UN Women juga bekerja sama dengan beberapa Kementerian-Kementerian di negara Afghanistan untuk memberikan pengetahuan mengenai kekerasan perempuan melalui kampanye dan juga melakukan pelatihan-pelatihan yang sudah dijelaskan sebagaimana di atas. UN Women sendiri melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang hasilnya digunakan untuk melakukan advokasi terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

4.3 Kendala dan Tantangan UN Women

Dalam peran yang dilakukan oleh UN Women dalam menangani masalah perempuan di Afghanistan terdapat hambatan dan juga tantangan tersendiri yang menghalangi kinerja dari program yang telah dilakukan oleh UN Women tersebut. Adapun hambatan yang terjadi dalam peran dari UN Women tersebut dalam menangani masalah perempuan di Afghanistan, yaitu:

1. Tradisi masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan

Nilai kebudayaan yang masih sangat kental dan juga berpengaruh dalam menerapkan sistem pemberdayaan terhadap perempuan pun menjadi terhambat. Kebudayaan yang masih sangat berpengaruh dalam menentukan peraturan terutama didalam status perempuan. Hal tersebut bisa dilihat dari masyarakat pelosok desa yang masih menerapkan sistem kebudayaan yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada kaum laki-laki. Masih banyak juga ditemukan para kaum perempuan Afghanistan tidak diizinkan keluar rumah tanpa disertai oleh muhrimnya, dan kurangnya perempuan Afghanistan untuk mendapatkan dan menerima pendidikan maupun pekerjaan.

Walaupun kondisi status perempuan di kota tersebut sudah mulai membaik saat ini, akan tetapi di dalam penerapannya masih kurang karena dipengaruhi oleh budaya. Masih juga ditemukan perempuan yang tidak mendapatkan dan menyampaikan hak pendapatnya dan masih ditemukannya juga pendapat upah yang rendah. Perempuan Afghanistan juga masih sulit mendapatkan akses kesehatan, meskipun demikian kini perempuan sudah diperbolehkan belajar dan mendapatkan pekerjaan, tetapi masih harus diawasi dan dibawah peraturan oleh saudara laki-laki nya sendiri. Penyetaraan gender dan status perempuan membutuhkan proses yang lebih lama dan juga perlu melakukan upaya pemberdayaan sampai ke pelosok daerah.³⁴

2. Belum optimalnya penerapan aturan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat

Larangan diskriminasi antar penduduk Afghanistan juga telah dilarang dalam pasal 22 yang berbunyi: “Segala bentuk diskriminasi antara warga Afghanistan dilarang. Warga Afghanistan juga memiliki hak dan tugas yang sama di hadapan hukum”, maka hal tersebut bertentangan dengan yang terjadi di Afghanistan terutama dalam hak perempuan Afghanistan.

Peraturan tentang diskriminasi di bidang pendidikan terhadap kaum perempuan telah diratifikasi dalam bab 2 pasal 43 dan 44. Penerapan terhadap masyarakat masih belum menunjukkan adanya perubahan

³⁴ Yousafzai, Malala.2014. *I Am Malala* .Bandung: PT Mizan Pustaka hlm 342

yang signifikan terutama dalam hal perempuan yang berada di tempat terpencil. Di dalam pasal 46 mengatakan bahwa meningkatkan pendidikan merupakan tanggung jawab negara tetapi peraturan di beberapa daerah melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 48 mengatur hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dengan menempuh jam kerja dan juga mendapatkan upah serta hak dalam pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki serta juga mendapatkan hak bebas untuk memilih berbagai pekerjaan.

Pada tahun 2012 lalu, seorang perempuan mendapatkan hukuman karena bekerja di film layar lebar, pekerjaan ini dianggap oleh mereka pekerjaan yang dipandang ‘Non-Islamis’, perempuan yang berani tampil di depan publik akan dicap *negative* di negara Afghanistan.³⁵ Masih juga adanya hak terbatas terhadap perempuan dalam hak pekerjaan, selain itu upah mereka juga lebih rendah dibandingkan laki-laki.

3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap penyeteraan gender

Penyeteraan terhadap status perempuan juga dibutuhkan dukungan dan juga perlindungan dari pihak yang berwajib seperti pengadilan, kepolisian dan tentunya dari pemerintah negara itu sendiri. Namun dari pihak kepolisian Afghanistan sendiri tidak memberikan dukungan dan bantuan saat para kaum perempuan Afghanistan melaporkan tindak kejadian dan tindak kriminal atas diskriminasi yang menimpanya, pihak kepolisian juga tidak

membuat catatan laporan bahkan mereka menahan perempuan yang telah keluar seorang diri dari rumahnya untuk pergi ke pihak berwajib. Selain itu para pihak pengadilan Afghanistan juga tidak memberikan bantuan yang besar, mereka hanya akan mengeluarkan surat keputusan penahanan bagi pelaku diskriminasi dan mereka hanya lebih fokus kepada perempuan yang keluar seorang diri dari rumahnya tanpa ada pengawasan dari mahram atau pengawasan dari laki-laki dari keluarganya.

4. Rendahnya dukungan masyarakat atau keluarga terhadap penyeteraan gender

Di negara Afghanistan sendiri, tanpa hadirnya seorang anak laki-laki sebuah keluarga dianggap lemah di negara yang dilanda peperangan. Pihak keluarga sendirilah yang merupakan pendukung utama dalam penyeteraan gender karena biasanya faktor diskriminasi berawal dari dalam keluarga sendiri. Jika seorang perempuan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki dari rumah sakit akan dirayakan dengan musik dan juga disajikan dengan berbagai makanan.

Diskriminasi yang dialami oleh perempuan Afghanistan adalah berupa larangan untuk menempuh pendidikan dan juga ditambah faktor kemiskinan yang mempengaruhi keluarga untuk lebih mengutamakan para laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Anak perempuan dianggap lemah karena tidak perlu bersekolah atau bekerja diluar, mereka hanya dituntut untuk melayani suami, ayah atau juga

³⁵ DW Deutsche Welle - “Lima Tahun Kuota Perempuan di Parlemen Afghanistan” dalam situs <http://www.dw.de/lima-tahun-kuota-perempuan-di->

parlemen-afghanistan/a-1474376 diakses pada 03 juli 2022 pukul 10.32 WIB.

saudara laki-laki nya di dalam rumah saja. Jikalau para perempuan harus bekerja diluar rumah, maka ia akan mendapatkan beban kerja yang lebih besar.

5. Keterbatasan pengetahuan perempuan menyangkut peraturan hak gender

Walau para perempuan Afghanistan sudah banyak yang mulai bekerja sebagai anggota kabinet, anggota parlemen, pegawai sipil dan menjadi aktivis untuk hak perempuan yang berjuang menjamin kesetaraan dengan laki-laki di tengah masyarakat. Para perempuan Afghanistan juga sudah mulai terlibat di dalam dunia seni, ekonomi dan juga di dalam beberapa kegiatan sosial lainnya, namun hal ini masih hanya berfokus kepada kota besar saja.

Masih banyak ditemukan nya perempuan dari daerah pinggiran Afghanistan tidak mengetahui hak-hak asasi perempuan secara umum, bagi para perempuan penyadaran akan hak-hak yang akan mendorong mereka untuk memperjuangkan statusnya di dalam masyarakat saja. Namun penting juga penguatan dan pemberdayaan perempuan dilakukan dengan membekali para masyarakat terutama para perempuan tentang pentingnya pemahaman terhadap HAM.

6. **Kesimpulan**

United Nations Women (UN Women) merupakan Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan juga untuk kesetaraan gender yang bergerak dibawah naungan PBB. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Afghanistan juga disebabkan oleh tradisi masyarakat yang bisa dibilang berbahaya bagi kaum

perempuan dan juga lemahnya penerapan hukum di negara Afghanistan. Semenjak hadirnya UN Women hak-hak perempuan di Afghanistan mulai diperbaiki melalui usaha-usaha untuk menciptakan kesetaraan diberbagai bidang seperti, ekonomi, edukasi, akses hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.

7. UN Women berperan sebagai Instrument, Arena dan Aktor Independen. UN Women sebagai instrument melakukan kerja sama, sebagai arena melakukan pertemuan sedangkan sebagai aktor independen UN Women melakukan kampanye edukasi untuk para perempuan Afghanistan. Untuk menjalani perannya dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah di Afghanistan juga ikut bekerja sama dengan Organisasi Internasional ini dengan membantu UN Women dalam melakukan Kampanye, Pertemuan dan juga Kerjasama untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan kekerasan dan memberikan keadilan bagi kaum perempuan. Namun hal ini masih banyak kendala karena masih banyak ditemukan petugas penegak hukum yaitu seperti polisi, jaksa dan hakim yang belum memahami betul bagaimana hukum ini secara mendalam. Oleh karena itu UN women membuat pelatihan dan kampanye agar masyarakat Afghanistan bisa mengerti akan apa dampaknya bagi para masyarakat. Usaha ini sesuai dengan peran UN Women sebagai Organisasi Internasional yang fokus dibidang kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Journal:

- Anak Agung Banyu Perwit, Naufal A. "The Russian Armed Forces "New Look" Reform (2008-2013)." [Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional](#), 2019, 183-204.
Doi:10.33822/Mjihi.V2i2.1325.
- Goshis, Ahmed. [A History Of Women In Afghanistan: Lessons Learnt For The Future Or Yesterdays And Tomorrow: Women In Afghanistan](#). 4 (N.D.).
- Harness, Avissa. "Nasib Perempuan Afghanistan Saat Taliban Berkuasa, Terancam Mengalami Kemunduran." Kumparan. Last Modified August 18, 2021. <https://Kumparan.Com/Kumparanwoman/Nasib-Perempuan-Afghanistan-Saat-Taliban-Berkuasa-Terancam-Mengalami-Kemunduran-1wm9ipmjr5/4>.
- "A Long Way To Go : Implementation Of The Elimination Of Violence Against Women Law In Afghanistan / United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA)." 2012. Doi:10.29171/Azu_Acku_Pamphlet_Hq1236_5_A3_L669_2012
- "Perempuan Afghanistan Represi Dan Resistensi." OSF. Accessed July 2, 2022. <https://osf.io/7a8zc/>.
- "Stop-Violence-Against-Women-Clinton-Usa-Will-Not-Abandon-Women-Of-Afghanistan-May-17-2010." [Human Rights Documents Online](#) (N.D.). Doi:10.1163/2210-7975_Hrd-3601-0148.
- Taft, Angela J., Rhonda L. Powell, And Lyndsey F. Watson. "The Impact Of Violence Against Women On Reproductive Health And Child Mortality In Timor-Leste." [Australian And New Zealand Journal Of Public Health](#) 39, No. 2 (2015), 177-181. Doi:10.1111/1753-6405.12339.
- "Taliban Afghanistan: A True Islamic State?" [The Limits Of Culture](#), 2006. Doi:10.7551/Mitpress/4237.003.0011.
- Anwari, Alan J. Taylor And Hangama, Assistance To The UN Women Afghanistan Country Programme In The Planned Period 2010-2013, UN Women, February 2013 "CIMIC On The Edge: Afghanistan And The Evolution Of Civil-Military Operations." [Civil-Military Cooperation In Post-Conflict Operations](#), 2007, 191-216. Doi:10.4324/9780203940600-16.